



PUTUSAN
Nomor 1376 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIYAN MAWAZI, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Karya Dulur Saroha, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 40, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Herni Hidayati, S.H., C.ME., dan kawan-kawan, Para Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hadi Simbolon & Rekan Banda Aceh, beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh Komp. Dephankam Blok B, Nomor 31, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Christopel Mihing Nomor 31, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;
2. **KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) KALIMANTAN II**, Direktorat Jenderal dan

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 79 Km, 2500 ha, F, K, SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;

3. **MELDA RIYANTI NAHAN, ST., MT sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA-I KALIMANTAN II**, Direktorat Jenderal dan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 79 km, 2500 ha, F, K, SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan tanggal 2 September 2022;
4. **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 22A.26 BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pelaksana Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 79 km,

Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2500 ha, F, K, SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Christopel Mihing Nomor 31 Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT. PAKU BANGUN JAYA, sebagai Pemenang Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC TA 2022, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 1 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

“memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik bersama-sama atau sendiri sendiri untuk menanggguhkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 79 km, 2500 ha, F, K, SYC tahun anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara” ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



3. Menyatakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Turut Tergugat dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang dibuat oleh Tergugat III kepada Turut Tergugat, berikut surat-surat turunannya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp50.070.000.000,00 (lima puluh miliar tujuh puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial:

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakibatkan hilangnya kredibilitas Penggugat dikalangan pelaku usaha sebagai akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak ternilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immaterial yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan atas perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Penggugat salah sasaran karena menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat (*error in persona (gemis aanhoeda nigheid)*);
- Penggugat tidak memiliki kepentingan/kerugian/*legal standing* mengajukan gugatan *a quo (eror in persona (diskualifikasi in person))*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Kompetensi absolut;
- Eksepsi lain-lain:
 - a. Eksepsi *error in persona (diskualifikasi in person)*;
 - b. Eksepsi *legal standing*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *error in persona (diskualifikasi in person)*;
- Eksepsi *legal standing*;
- Eksepsi *obscuur libel* atau gugatan kabur;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *error in persona (diskualifikasi in person)*;
- Eksepsi *obscuur libel* atau gugatan kabur;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang memeriksa perkara;
- Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Penggugat salah alamat menempatkan PT Paku Bangun Jaya Kantor Pusat sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian materiil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Kerugian immateriil senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 3 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLK., tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/PDT/2023/PT PLK *Juncto* Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 39/PDT/2023/PT PLK., tanggal 8 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk.,

Hal. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Turut Tergugat dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang dibuat oleh Tergugat III kepada Turut Tergugat, berikut surat-surat turunannya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp50.070.000.000,00 (lima puluh miliar tujuh puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immaterial:

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakibatkan hilangnya kredibilitas Penggugat dikalangan pelaku usaha sebagai akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan

Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak ternilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, kerugian immaterial yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini:

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 6 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 6 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak terdapat

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat IV telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Penggugat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 79 Km, 2500 HA, F, K, SYC Nomor PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029., tertanggal 14 Juli 2022, dan berdasarkan hasil pemilihan tender;
- Bahwa Tergugat IV menemukan adanya beberapa surat perjanjian sewa yang ditandatangani oleh PT Sinar Cempaka Raya selaku pemilik alat pada beberapa paket pekerjaan yang sedang ditenderkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, sehingga untuk memastikan kebenaran dari Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022, Tergugat IV melakukan klarifikasi langsung kepada PT Sinar Cempaka Raya, bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diketahui PT Sinar Cempaka Raya menyatakan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Sinar Cempaka Raya dengan Penggugat yang dimiliki PT Sinar Cempaka Raya tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan Penggugat pada sistem SPSE, sehingga penawaran Penggugat dinyatakan gugur oleh Tergugat IV;
- Bahwa oleh karena dinyatakan gugur, Penggugat telah mengajukan upaya sengketa terhadap hasil pemilihan tender melalui Surat Nomor 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022, tanggal 17 Juli 2022, yang kemudian Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat tersebut melalui surat Tergugat IV Nomor PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa oleh karenanya terbukti apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana tugas dan kewenangannya terhadap Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



Belanti II, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, 79 km, 2500 ha, F, K, SYC Tahun Anggaran 2022 dengan segala prosedur pelaksanaannya telah dilakukan secara tepat dan benar sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;

- Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi merasa keberatan dengan tuduhan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi secara materiil dan secara moril adalah tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIYAN MAWAZI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIYAN MAWAZI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati,

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2024